

KAWASAN PASIFIK SELATAN DAN KEHADIRAN KEKUATAN-KEKUATAN ASING

Ronald NANGOI*

I. PENDAHULUAN

Kawasan Pasifik Selatan, yang terdiri atas beberapa negara kecil dan ribuan pulau kecil dan terletak di suatu samudera (Pasifik) yang amat luas (meliputi 35 persen permukaan bumi dan separuh dari luas lautan), kurang mendapat sorotan daripada kawasan dunia lainnya seperti Eropa dan Timur Tengah, sehingga perkembangan-perkembangan baru yang terjadi di situ tidak banyak diketahui dunia. Hal itu bisa dimengerti karena masalah geografi dan komunikasi. Luasnya Samudera Pasifik mempersulit komunikasi antara kawasan ini dan negara-negara di dunia lainnya. Daratan di Pasifik Selatan hanya tiga persen dari samudera yang luasnya 25 juta mil persegi. Hal ini kurang menguntungkan kawasan Pasifik Selatan. Faktor-faktor lain seperti jumlah penduduk yang kecil, serta tingkat perekonomian dan taraf hidup rakyat yang rendah juga semakin menjauhkan kawasan ini dari perhatian dunia pada umumnya.

Kawasan ini umumnya lebih dikenal sebagai daerah pariwisata dan dunia legenda. Menurut Bhagwan Singh, Pasifik Selatan adalah dunia legendaris yang indah, yang diabadikan oleh karya seni Paul Gaugin, karakter-karakter James Michner dan Somerset Maugham serta novel-novel R.L. Stevenson. Kemudian bagi orang-orang Eropa, Pasifik Selatan masih merupakan matahari, laut, dan pasir, gadis-gadis penari serta penduduk asli yang ramah.¹

Tetapi beberapa perkembangan seperti munculnya negara-negara baru dan perjuangan kemerdekaan beberapa negara mencerminkan bahwa proses

*Staf CSIS.

¹Lihat Bhagwan Singh, "The South Pacific: A New Regional Entity," *India Quarterly*, Vol. 34, No. 3, Juli-September 1978, hal. 367.

dekolonisasi sedang berlangsung di kawasan ini. Apalagi beberapa negara besar berusaha untuk memasukinya, sehingga Pasifik Selatan mulai berubah menjadi kawasan yang penting. Beberapa pengamat internasional berusaha menunjukkan faktor-faktor strategisnya. Antara lain, Keith D. Suter dari Universitas Sidney mengatakan bahwa Pasifik Selatan selayaknya mendapat lebih banyak perhatian dari para politikus dan ilmuwan Amerika Utara dan Eropa Barat, karena, jika tidak ada alasan lain, kawasan ini bisa menjadi titik api (flashpoint) konfrontasi militer atau politik. Ia selanjutnya mengemukakan bahwa "alasan pertama menonjolnya Pasifik Selatan secara sederhana adalah bahwa ia merupakan lanjutan Pasifik Utara ke arah selatan..."; alasan kedua adalah bahwa koloni-koloni Pasifik Selatan dan wilayah-wilayah perwalian PBB (*United Nations Trust Territories*) mulai menjadi negara-negara yang merdeka.¹ Philip Boring dari *Financial Times* memberikan alasan-alasan lain, yaitu bahwa: (a) kawasan itu menguasai perhubungan laut antara Jepang, Korea, Amerika Serikat dan sumber-sumber bahan mentah Australia; (b) negara-negara pulau yang kecil secara potensial merupakan sumber-sumber kekayaan alam yang besar dan kekuatan teoritis di bagian terbesar Pasifik Selatan, apalagi karena prinsip 200 mil telah diterima; *item* yang paling menarik adalah perikanan, terutama tuna; tetapi terdapat juga daya tarik laut dalam (deep-sea); dan (c) akibat kelemahan ekonomi mereka banyak negara Pasifik Selatan mudah diserang oleh kekuatan besar.² Kalau kedua pengamat ini melihat Pasifik Selatan dari sudut kepentingan ekonomi dan status negara-negara merdeka ini, maka Ali Moertopo dalam buku "Strategi Pembangunan Nasional" menitikberatkan pengaruh perkembangan teknologi bagi masa depan kawasan ini. Ia mengatakan: "Meningat luasnya Samudera Pasifik - terluas di antara ketiga samudera - sementara kalangan melihat faktor jarak ini sebagai hambatan. Tetapi dengan kemajuan teknologi kiranya di hari yang akan datang hambatan ini dengan mudah teratasi. Apalagi jika diingat bahwa lautan yang selama ini dianggap sebagai penghalang mendapat arti geo-politis baru, justru karena arti lautan itu sendiri menjadi sangat penting. Kiranya bukan suatu lamunan, bahwa apabila Samudera Atlantik adalah samudera masa kini, Samudera Hindia adalah samudera masa lalu, maka Samudera Pasifik adalah samudera masa depan."³

Tulisan ini bermaksud membahas perkembangan di Pasifik Selatan dan masalah-masalah yang dihadapinya, setidak-tidaknya untuk memberikan gambaran umum tentang situasi kawasan itu dewasa ini.

¹Lihat Keith D. Suter, "The South Pacific - A New Region for Confrontation," *Marine Policy*, Vol. 6, No. 1, Januari 1982, hal. 58.

²Lihat *Financial Times*, 20 Mei 1980.

³Lihat Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1981), hal. 275.

II. PERKEMBANGAN DI KAWASAN PASIFIK SELATAN

Sejak dekade 1960-an, beberapa pulau dan kepulauan jajahan Eropa di Pasifik Selatan mengalami perubahan status politik menjadi negara-negara pulau yang merdeka, dan beberapa diantaranya telah diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sebelumnya hampir seluruh wilayah di kawasan itu merupakan jajahan negara-negara Barat, seperti Inggris, Perancis, Jerman Barat, Spanyol, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru.

1. Proses Dekolonisasi

Perubahan status politik ini adalah akibat suatu proses dekolonisasi terutama di pulau-pulau yang mempunyai potensi untuk menjadi negara-bangsa di Pasifik Selatan. Dalam tahun 1980-an, dua wilayah memperoleh kemerdekaan, yaitu Vanuatu (sebelumnya New Hebrides) dari Perancis dan Inggris (30 Juli 1980) dan Belau (sebelumnya Pulau Palau) dari Amerika Serikat (29 Januari 1982). Kemerdekaan Vanuatu rupanya mempengaruhi kepulauan-kepulauan tetangganya, terutama Kaledonia Baru, yang masih merupakan jajahan Perancis. Dewasa ini penduduk asli Melanesia menuntut kemerdekaan bagi Kaledonia Baru sebelum 1985. Pada tahun 1979, kelompok pro-kemerdekaan "Kanak Independence Front" meminta Forum Pasifik Selatan untuk mendesak Komisi PBB tentang dekolonisasi agar mendaftarkan Kaledonia Baru sebagai wilayah non-otonom, sehingga memenuhi syarat bagi dekolonisasi.¹ Tetapi Perancis tidak bersedia melepaskannya, karena kemerdekaan Kaledonia Baru akan merugikan kepentingannya di negara itu dan juga di kawasan Pasifik Selatan.

Tidak lama sebelumnya beberapa kepulauan jajahan telah memperoleh kemerdekaan. Dalam tahun 1960-an, Samoa Barat memperoleh kemerdekaan dari Selandia Baru (1 Januari 1962), dan Nauru dari PBB dan Australia (30 Januari 1968); kemudian, dalam tahun 1970-an, Tonga dari Inggris (4 Juni 1970), Fiji dari Inggris (10 Oktober 1970), Papua Niugini dari Australia (16 September 1975), Tuvalu dari Inggris (1 Oktober 1978), Kepulauan Solomon dari Inggris (7 Juli 1978), dan Kiribati dari Inggris (12 Juli 1979).

Dekolonisasi di Pasifik Selatan berlangsung sejalan dengan proses dekolonisasi di dunia sejak PBB menetapkan deklarasi mengenai dekolonisasi

¹Lihat Bryant J. Allen, "The Pacific Islands," *The Far East and Australasia 1980-1981* (Europa Publication Limited, 1980), hal. 822.

pada tahun 1960 yang menuntut penghapusan penjajahan di dunia. Beberapa negara pulau yang telah merdeka memberi dukungan yang kuat kepada kepulauan tetangganya yang masih dijajah untuk memperoleh kemerdekaan melalui PBB. Status mereka sebagai anggota PBB memungkinkan mereka untuk memperjuangkan nasib negara-negara tetangga. Negara-negara Pasifik Selatan yang telah menjadi anggota PBB adalah Fiji (13 Oktober 1970), Papua Niugini (10 Oktober 1975), Samoa (15 Desember 1976), Kepulauan Solomon (19 September 1978), dan Vanuatu. Papua Niugini tampaknya memanfaatkan status keanggotaannya di PBB untuk memberi suara bagi kemerdekaan pulau-pulau Pasifik Selatan.

Proses dekolonisasi di kawasan ini berjalan lebih baik, karena negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru (kecuali Perancis) rela melepaskan negara-negara jajahannya. Mereka ingin melindungi citra mereka sebagai negara-negara demokrasi dan selain itu negara-negara jajahan ini menjadi beban bagi mereka, sehingga mereka tidak mau mengikat diri lebih lama lagi dengan negara-negara pulau ini.

Namun beberapa kepulauan masih jajahan atau di bawah pengawasan negara-negara asing, yaitu: Kepulauan Pitcairn (Inggris), Kepulauan Society, Tuamotu (Australia), Gambier dan Kepulauan Marquesas, Wallis dan Futuna, serta Kaledonia Baru (Perancis), Tokelau, Kepulauan Cook (Australia), Kepulauan Karolina, Marshall dan Mariana Utara, Guam dan Samoa Amerika (Amerika Serikat).¹ Status pulau-pulau ini di masa mendatang belum jelas. Di satu pihak, Perancis masih berusaha mempertahankan status kepulauan jajahannya dan di pihak lain, beberapa pulau masih sulit memilih kemerdekaan karena belum mampu untuk menjadi negara-bangsa sehubungan dengan kecilnya wilayah dan jumlah penduduk mereka.²

Bersamaan dengan proses dekolonisasi ini, negara-negara Pasifik Selatan berusaha untuk membentuk suatu kesatuan politik bagi masyarakat Pasifik Selatan melalui integrasi bangsa. Negara-negara yang merdeka ini telah mendirikan organisasi-organisasi regional, yaitu Komisi Pasifik Selatan (South Pacific Commission) dan Forum Pasifik Selatan (South Pacific Forum). Komisi Pasifik Selatan didirikan berdasarkan Persetujuan Canberra 1947 oleh Belanda, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Australia dan Selandia Baru, sedangkan Forum Pasifik Selatan didirikan pada tanggal 5 Agustus 1971 oleh Australia, Selandia Baru dan beberapa negara merdeka.

Semangat regionalisme tampaknya kuat sekali (antara lain dalam forum-forum regional ini), sehingga masyarakat Pasifik Selatan tidak mengalami

¹*Ibid.*, hal. 833.

²Lihat SM Koya, "A South Pacific View," yang diterbitkan Mary Boyd, *Pacific Horizons* (Wellington: Price Milburn and Company Limited, 1971), hal. 36.

banyak kesukaran untuk menentukan identitas kawasannya. Menurut Peter J. Boyce dan Richard A. Herr, semangat identifikasi regional amat kuat di kalangan negara-negara yang baru merdeka, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk saling bertukar misi. Para menteri negara Pasifik Selatan yang satu bebas untuk berhubungan langsung dengan rekan negara Pasifik Selatan lainnya. Komunikasi tidak terbatas pada jalur-jalur khusus tetapi sebanyak mungkin bersifat langsung dan personal.¹

Tetapi negara-negara ini masih sulit berdiri sendiri, karena keterbatasan kemampuan (*capability*) mereka. Mereka amat tergantung pada bantuan negara-negara asing, khususnya Australia dan Selandia Baru.

2. Negara-negara Pasifik Selatan sebagai Bagian Dunia Ketiga

Rendahnya tingkat kemampuan ekonomi dan ketergantungan pada negara-negara maju menempatkan negara-negara Pasifik Selatan dalam kategori *Dunia Ketiga*. Kedudukan ini merupakan keistimewaan bagi negara-negara Pasifik Selatan, karena berarti kenaikan status sebagai negara-negara yang merdeka dan mempunyai hak bersuara seperti negara-negara Dunia Ketiga lainnya. Menurut Keith D. Suter, kedudukan sebagai Dunia Ketiga memungkinkan mereka memperoleh suara Dunia Ketiga dan akses ke badan-badan internasional. Mereka sekarang bisa meminta bantuan Dunia Ketiga, misalnya dalam usaha-usaha mereka menentang penjajahan.²

Tetapi, kedudukan ini diartikan bahwa negara-negara Pasifik Selatan menghadapi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang sama dengan negara-negara Dunia Ketiga lainnya. Suter merumuskan bahwa negara-negara Pasifik Selatan adalah "kesukaran untuk memenuhi kebutuhan akan peningkatan taraf hidup secara material - sehubungan dengan kesulitan ekonomi."³ Masalah-masalah ini memang dirasakan oleh negara-negara Pasifik Selatan. S.M. Koya mengemukakan bahwa terdapat masalah rendahnya taraf pendidikan, tekanan kependudukan, masalah urbanisasi dan pengangguran serta kekurangan gizi di kawasan Pasifik. Timbul kekecewaan bahwa sumber-sumber daya baik manusia maupun material menghambat mereka untuk memenuhi harapan-harapan akibat kontak dengan teknologi dan kebudayaan yang lebih *sophisticated*. Ia mengakui bahwa masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial mungkin lebih kecil skalanya daripada di kawasan-

¹Lihat Peter J. Boyce dan Richard A. Herr, "Micro State Diplomacy in the South Pacific," *Australian Outlook*, Vol. 28, No. 1, April 1974, hal. 27.

²Lihat Keith D. Suter, *loc. cit.*, hal. 59.

³*Ibid.*

kawasan yang berkembang lainnya, tetapi masalah-masalah ini sangat menekan.¹

Kesulitan ekonomi negara-negara ini tidak lepas dari keterbatasan hasil-hasil produksi. Mereka umumnya mendasarkan perekonomiannya pada sektor pertanian dan industri primer. Ekspor terbatas pada hasil-hasil produksi pertanian berupa kopra, gula, pisang, minyak kelapa sawit, dan coklat, dan hasil pertambangan seperti emas, tembaga, nikel, dan fosfat.

Ketergantungan pada negara-negara industri maju bisa dilihat dalam bidang bantuan luar negeri dan perdagangan. Sejak kemerdekaan, mereka menerima bantuan luar negeri dari Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, dan juga badan-badan internasional. Papua Niugini menerima bantuan dari Australia (28 persen anggaran pendapatan 1980); Kiribati dari Inggris; Kepulauan Solomon dari Inggris, Australia, dan Selandia Baru; Tonga dari Inggris, Selandia Baru, Australia, dan Bank Pembangunan Asia; Tuvalu dari Inggris; Samoa Barat dari Selandia Baru, Australia, PBB, MEE, dan IMF. Perdagangan luar negeri yang merupakan sumber pendapatan negara masih tertuju pada negara-negara industri tertentu terutama Australia dan Selandia Baru. Mereka tampaknya tidak bisa melepaskan keterikatannya dengan kedua negara ini. Dalam pertemuan bulan Juni 1979, di Kepulauan Cook, menteri-menteri negara Pasifik Selatan mendesak kedua negara ini untuk membeli lebih banyak hasil pertanian dan industri mereka.

Walaupun menyadari ketergantungan ini, negara-negara Pasifik Selatan *tidak mau dianggap sebagai bagian Dunia Ketiga*. Ratu Sir Kamisese Mara, Perdana Menteri Fiji mengatakan: "Pandangan terhadap bangsa Afrika tampaknya diterima seadanya dan ditujukan pada semua penduduk asli. Ini tidak berlaku bagi Pasifik Selatan." Ringkasnya negara-negara Pasifik Selatan tidak sama dengan negara-negara seperti Ghana, Tanzania, atau Malaysia.² Terdapat pendapat bahwa masyarakat Pasifik Selatan memiliki taraf hidup yang lebih baik daripada negara-negara Dunia Ketiga lainnya. E.K. Fisk dalam tulisannya "Economic, Social and Political Trends in the South Pacific in the 1980s" mengemukakan bahwa menurut ukuran umum, hampir seluruh rakyat Pasifik berada (well-off), suatu hal yang cukup menonjol dalam statistik. Dibandingkan dengan negara-negara miskin di Asia dan Afrika, negara-negara Pasifik jelas berada di luar kategori negara-negara miskin.³

¹Lihat S.M. Koya, *loc. cit.*, hal. 36.

²Lihat Peter J. Boyce dan Richard A. Herr, *loc. cit.*, hal. 26.

³Ia mengambil Bangladesh, Birma, India, dan Indonesia sebagai contoh negara Asia yang miskin. Lihat E.K. Fisk, "Economic, Social, and Political Trends in the South Pacific in the 1980s," yang diterbitkan T.J. Hearn, *New Zealand and the South Pacific* (Dunedin: University of Otago, 1981), hal. 53.

Kehidupan serupa itu memberi warna khusus kepada masyarakat Pasifik Selatan. Mereka memang secara potensial memiliki kekayaan alam yaitu mineral dasar laut, perikanan, dan bahan-bahan tambang seperti emas, nikel, dan fosfat. Kemajuan teknologi akan mempermudah penggarapan potensi sumber-sumber alam tersebut di kemudian hari. Masalahnya adalah apakah negara-negara Pasifik Selatan ini mampu memanfaatkan kekayaan lautnya. Peranan negara-negara maju khususnya di bidang teknologi tidak bisa dielakkan, karena mereka memiliki teknologi dan juga membutuhkan sumber-sumber daya alam ini.

III. KEHADIRAN NEGARA-NEGARA BESAR DI PASIFIK SELATAN

Keterlibatan atau kehadiran negara-negara luar di kawasan Pasifik Selatan menjadi petunjuk bahwa kawasan ini merupakan salah satu kawasan penting di dunia. Negara-negara luar ini meliputi Perancis, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Soviet serta Cina, yang melibatkan diri dalam bentuk kolonialisme, percobaan nuklir, operasi kapal ikan, dan hubungan diplomatik di kawasan ini. Kepentingan mereka umumnya berlainan satu sama lain. Perancis tetap berusaha mempertahankan daerah jajahannya, yaitu Kaledonia Baru dan Polinesia Perancis. Di samping ingin tetap menjadi kekuatan regional utama di Pasifik Selatan, Perancis memiliki: (a) kepentingan ekonomi, khususnya di bidang pertambangan mineral, karena Kaledonia Baru memiliki cadangan nikel yang besar di dunia; dan (b) kepentingan strategis, yaitu penggunaan kawasan Pasifik Selatan sebagai daerah percobaan nuklir. Jepang lebih membutuhkan Pasifik Selatan bagi kepentingan ekonominya. Potensi perikanan (tuna) Pasifik Selatan bisa memenuhi kebutuhan konsumsi bangsa Jepang. Sementara itu Amerika Serikat, meskipun tidak begitu memperhatikan perkembangan negara-negara Pasifik Selatan, memiliki kepentingan strategis (pertahanan) di kawasan Pasifik, antara lain penggunaan Kepulauan Mikronesia sebagai salah satu pangkalan pertahanan Amerika Serikat. Kehadiran riil Uni Soviet dalam bentuk operasi kapal-kapal ikan dan kapal-kapal penjelajah di perairan Pasifik menantang Amerika Serikat dan juga Cina sebagai saingan utamanya di kawasan ini.

1. Dilemma Perancis sebagai Kekuatan Kolonial

Satu-satunya negara yang masih berusaha mempertahankan kehadirannya sebagai kekuatan kolonial secara menyolok di Pasifik Selatan adalah Perancis, sehingga ia bisa disebut sebagai negara kolonial pertama dan terakhir di kawasan ini. Di atas dikemukakan bahwa negara-negara seperti Inggris,

Australia, dan Selandia Baru secara resmi telah melepaskan daerah-daerah jajahan mereka dan malahan mendukung perjuangan kemerdekaan penduduk asli beberapa pulau. Negara-negara jajahan atau bekas jajahan Perancis terdiri atas Kaledonia Baru, Polinesia Perancis, Wallis dan Futuna, serta Vanuatu (sebelumnya New Hebrides). Alasan-alasan bahwa Perancis tetap bertahan di kawasan Pasifik khususnya Kaledonia Baru adalah sebagai berikut: (a) pulau-pulau atoll Polinesia Mururoa dan Fangataufa menjadi tempat-tempat percobaan senjata-senjata nuklir Perancis; (b) Kaledonia Baru merupakan sumber mineral yang paling berharga di Pasifik Selatan, dengan cadangan nikel yang besar di dunia, cadangan-cadangan mineral lain dan sedang melakukan eksplorasi minyak lepas pantai; (c) jajahan Perancis di Pasifik Selatan adalah sekitar 22.600 km persegi, tetapi zona ekonomi 200 mil memperluasnya lebih dari 7 juta km persegi sehingga Perancis menjadi kekuatan maritim paling besar di Pasifik Selatan, dan terdapat potensi pertambangan dasar laut dan perikanan; dan (d) teori domino masih berlaku di Perancis, artinya Paris takut bahwa jika ia memberikan kemerdekaan kepada Kaledonia Baru, maka Polinesia akan segera menyusulnya.¹

Tetapi kedudukan Perancis makin terdesak oleh proses dekolonisasi yang sedang berlangsung di kawasan ini. Penduduk asli kepulauan jajahan Perancis menuntut kemerdekaan, sehingga Perancis pada pertengahan 1980 terpaksa memberi kemerdekaan kepada New Hebrides. Sekarang ini, Perancis menghadapi penduduk Melanesia dari Kaledonia Baru yang juga menuntut kemerdekaan, mengikuti jejak negara-negara pulau yang telah merdeka lainnya.

Penduduk Melanesia itu mendapat dukungan negara-negara tetangganya, terutama Vanuatu dan Papua Niugini. Dukungan ini tidak lepas dari aspirasi dan perjuangan mereka agar semua wilayah Pasifik Selatan bebas dari penjajahan. Partai Vanuaaku pernah mengatakan bahwa salah satu tujuan utamanya adalah memperjuangkan kemerdekaan Kaledonia Baru pada tingkat internasional. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Julius Chan, Papua Niugini telah memberitahukan kepada Forum Pasifik Selatan bahwa perjuangan bagi kemerdekaan semua pulau Pasifik merupakan tujuan utama politik Pemerintah Port Moresby.²

Di samping tidak senang dengan praktek-praktek penjajahan, negara-negara Pasifik Selatan termasuk Australia dan Selandia Baru mengancam Perancis karena percobaan-percobaan nuklirnya di kawasan ini.³ Menurut

¹Lihat *Far Eastern Economic Review*, 11 September 1981.

²Lihat Wolfgang Ramonat, "Microstates in the United Nations," *Aussen Politik*, Vol. 32, No. 3, 1981, hal. 288; lihat juga *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 21 Juli 1980.

³Menurut pejabat-pejabat Australia, sejak 1975 Perancis telah melakukan sekitar 40 kali percobaan nuklir di Polinesia. Lihat *Far Eastern Economic Review*, 11 September 1981.

mereka tindakan Perancis itu mengancam kelestarian lingkungan hidup kawasan Pasifik Selatan. Pada tahun 1970-an, Australia, Selandia Baru, dan Fiji mengadakan pemboikotan terhadap telekomunikasi, transportasi, dan perdagangan Perancis. Selandia Baru terutama prihatin terhadap negara-negara Pasifik mengenai masalah percobaan nuklir ini. Mengikuti jejak Australia, Selandia Baru mengajukan laporan resmi kepada mahkamah internasional (international court of justice) yang menegaskan bahwa Perancis tidak berhak untuk mengotori udara dan merampas kebebasan di laut.¹

Meskipun terdapat desakan-desakan, baik dari dalam maupun dari luar Kaledonia Baru, agar Perancis melepaskan jajahannya, kemerdekaan bagi Kaledonia Baru dan Polinesia Perancis tidak mudah dibandingkan dengan proses kemerdekaan Vanuatu. Perancis tidak rela melepaskan Kaledonia Baru, karena sebagaimana diutarakan di atas, ia mempunyai kepentingan khusus di bidang ekonomi dan strategi di kawasan ini. Selain itu, Perancis menganggap dirinya sebagai suatu kekuatan dunia yang besar dan untuk mempertahankan citra itu, ia perlu mempertahankan daerah pengaruhnya (sphere of influence). Jika Perancis kehilangan Kaledonia Baru, maka Tahiti akan meningkatkan tuntutan kemerdekaannya dan secara bertahap Perancis akan kehilangan daerah percobaan nuklirnya.²

Faktor lain yang mempersulit Kaledonia Baru melepaskan diri dari Perancis adalah komposisi penduduknya. Penduduk Melanesia yang menuntut kemerdekaan hanya berjumlah 60 ribu orang (40 persen dari seluruh penduduk Kaledonia Baru yang berjumlah 140 ribu orang), sedangkan penduduk berkebangsaan Eropa (50 ribu orang), dan penduduk yang berasal dari pulau-pulau sekitarnya dan Indonesia (30 ribu) umumnya menentang kemerdekaan bagi Kaledonia Baru.

2. Kehadiran Jepang di Pasifik Selatan

Jepang yang terletak di sebelah barat laut Samudera Pasifik bukan merupakan pendatang baru di kawasan Pasifik termasuk Pasifik Selatan. Dalam Perang Dunia Pertama pada bulan Oktober 1914 Jepang menduduki beberapa pulau di Pasifik, yaitu Kepulauan Nauru dan Mikronesia. Tetapi dalam masa Perang Dunia Kedua, Jepang terpaksa melepaskan pulau-pulau ini karena kalah perang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat

¹Lihat William E. Tagupa, "Centre D'Esperimentations in Pacifique 1963-1973: A Decade of Debate in French Polynesia," *Australian Outlook, loc. cit.*, hal. 40.

²Lihat Keith D. Suter, *loc. cit.*, hal. 58.

kemudian mengambil alih pulau-pulau ini. Sesudah itu Jepang tidak berperan secara aktif dalam dunia internasional, karena ia harus membangun ekonomi dalam negerinya dan memperkokoh percaya diri bangsanya.¹

Dalam situasi dunia yang mengalami banyak perubahan sekarang ini, Jepang sebagai raksasa ekonomi dunia mulai aktif lagi dalam dunia internasional. Di kawasan Pasifik Selatan, Jepang melibatkan diri dalam bentuk yang berbeda daripada di masa lalu, yaitu kerja sama ekonomi khususnya di bidang perikanan. Jepang sekarang amat berkepentingan dengan perikanan di Pasifik Selatan; sekitar 60 persen konsumsi makanan laut rakyat Jepang berasal dari kawasan Pasifik. Negara ini antara lain telah mengerahkan armada perikananannya di perairan Fiji, dan mendirikan perlengkapan gudang regional, menunjang pabrik pengalengan ikan di Lovuka, ibukota Fiji yang lama. Kegiatan yang sama dilakukan Jepang di perairan Samoa, termasuk pengalengan ikan di Pago-Pago, Samoa Amerika.²

Untuk memperkuat kehadirannya ini, Jepang telah mengadakan kerja sama dengan beberapa negara di daerah-daerah yang strategis. Menurut Bhagwan Singh, Jepang mengusahakan Kepulauan Mana menjadi daerah pariwisata di Fiji. Kalau pesawat-pesawat udara Jepang bisa mendarat di Fiji, maka *Air Nauru* bisa menggunakan salah satu pelabuhan udara Jepang. *Air Pacific* juga bisa mendarat di sana. Di Tonga, perusahaan-perusahaan dagang Jepang mempunyai rencana untuk mengembangkan Pulau Vavau menjadi daerah liburan bagi pejabat-pejabat tinggi Jepang. Duta Besar Jepang di Pasifik Selatan Yoship Yaka Wara meminta kepada penduduk pulau-pulau Pasifik agar mengizinkan Jepang masuk ke perairan mereka.³

Negara-negara lain yang juga berusaha memanfaatkan perairan Pasifik Selatan adalah Taiwan, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Negara-negara Pasifik Selatan sebenarnya merasa dirugikan oleh usaha-usaha penangkapan ikan ini. Akibat kelangkaan sumber-sumber daya alam di daratan, lautan dan kekayaan ikannya menjadi penting terutama bagi konsumsi rakyat mereka untuk waktu-waktu mendatang. Penerapan zona ekonomi 200 mil membuat kawasan ini semakin penting, tidak hanya sebagai sumber makanan, tetapi juga sebagai sumber pendapatan mereka.

Oleh sebab itu, mereka mengadakan usaha-usaha perlindungan bagi perairan Pasifik, antara lain dengan mendirikan *South Pacific Regional*

¹Lihat Alan Watt, "The Interests of Great Powers," yang diterbitkan Mary Boyd, *Pacific Horizons*, *loc. cit.*, hal. 65.

²Lihat Bhagwan Singh, *loc. cit.*, hal. 370.

³*Ibid.*, hal. 371.

Fisheries Agency (anggotanya: Australia, Selandia Baru, Papua Niugini, Fiji, Tonga, Samoa Barat, Kepulauan Solomon, Nauru, Niue, Kepulauan Cook, Kepulauan Gilbert dan Tuvalu) pada tahun 1978. Organisasi ini bermaksud mencegah suatu negara yang sedang berkembang diadudombakan dengan negara lain oleh negara-negara yang jauh dari perairan mereka.¹

Tetapi negara-negara Pasifik Selatan menghadapi masalah pengawasan ikan-ikan di perairan mereka, antara lain karena ikan tuna sebagai ikan utama di perairan Pasifik Selatan berpindah-pindah (migratory). Negara-negara asing penangkap ikan menangkap berbagai jenis tuna, terutama *skipjack tuna*, *yellow fin tuna*, *big eye tuna*, dan *albacore*. Tuna ini berpindah tempat dalam jarak-jarak yang besar; mereka secara musiman merantau ke gugusan kepulauan bagian barat laut dan tenggara. Sewaktu merantau ini, ikan-ikan ini melewati zona banyak negara dan dikejar oleh kapal-kapal ikan sehingga memasuki wilayah di mana mereka diijinkan untuk menangkap ikan-ikan itu.²

3. Kehadiran Amerika Serikat di Pasifik Selatan

Sampai batas-batas tertentu, perhatian Amerika Serikat atas perkembangan negara-negara Pasifik Selatan tidak begitu besar dibandingkan dengan perhatiannya atas negara-negara Dunia Ketiga lainnya. Menurut RA Herr, Amerika Serikat menunjukkan sedikit perhatian positif atas dekolonisasi dan perkembangan negara-negara mikro yang baru. Negara-negara ini tidak menjadi penerima bantuan, dukungan politik, atau perdagangan dari Amerika Serikat.³ Selain itu Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu kekuatan terakhir yang menduduki beberapa wilayah di Pasifik (Samoa bagian timur di Pasifik Selatan).

Tetapi ini tidak berarti bahwa Amerika Serikat sama sekali tidak berkepentingan dengan kawasan Pasifik, seperti yang terlihat dari kehadirannya di Kepulauan Mikronesia atau *Trust Territories* yang terletak di bagian barat laut Samudera Pasifik. Setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1947, Pemerintah Amerika Serikat secara resmi mengambil alih Kepulauan Mikronesia (kecuali Guam yang diduduki Amerika Serikat sejak Abad ke-18) dan Samoa Amerika dari Jepang. Kepulauan Mikronesia ini terdiri atas Kepulauan

¹Lihat Barbara Johnson dan Frank Langdon, "The Impact of the Law of the Sea Conference Upon the Pacific Region: Part II," *Pacific Affairs*, Vol. 51, No. 2, Summer 1978, hal. 224-225.

²Lihat M. Templeton, "Pacific Regional Institutions," yang diterbitkan T.J. Hearn, *New Zealand and the South Pacific*, *loc. cit.*, hal. 38.

³Lihat RA Herr, "Jimmy Carter and American Foreign Policy in the Pacific Islands," *Australian Outlook*, Vol. 32, No. 2, Agustus 1978, hal. 224.

Mariana, Kepulauan Karolina, Kepulauan Marshall, dan Pulau Palau, yang seluruhnya meliputi 3 juta mil persegi lautan dan 700 mil persegi daratan. Dari penduduk yang berjumlah 120 ribu orang, 75 ribu berdiam di Karolina, 30 ribu di Kepulauan Marshall, dan 15 ribu di Kepulauan Mariana¹ Pulau Palau pada tanggal 29 Januari 1982 menjadi Republik Belau, sedangkan kepulauan-kepulauan lainnya masih berada di bawah pengawasan Amerika Serikat dan salah satu di antaranya berstatus sebagai negara persemakmuran Amerika Serikat (Kepulauan Mariana).

Bagi Amerika Serikat, kepulauan-kepulauan ini sekurang-kurangnya mempunyai arti strategis bagi pertahanannya. Kepulauan Mikronesia menonjol karena merupakan suatu pangkalan persenjataan nuklir dan Angkatan Laut Amerika Serikat yang besar. Bhagwan Singh mengatakan bahwa Mikronesia merupakan *blue lagoon* Angkatan Laut Amerika Serikat. Beberapa pulau tidak jarang dipergunakan sebagai tempat percobaan misil penjelajah (*cruise missiles*).² Amerika Serikat juga telah membangun pangkalan-pangkalan di Guam, yang merupakan daerah pedalaman dan daerah penempatan pasukannya; dan separuh dari penduduk Guam yang berjumlah 105 ribu terdiri atas personal militer. Amerika Serikat telah menempatkan pesawat-pesawat pembom B 52 dan kapal-kapal selam polaris di Guam.³

Sejak akhir 1970-an, wilayah kepulauan ini menjadi semakin strategis buat Amerika Serikat, sebagian karena penarikan mundur pertahanannya dari Vietnam, dan terutama karena peningkatan kegiatan-kegiatan militer Uni Soviet, seperti pembangunan angkatan laut yang kuat, perdagangan dan armada perikanan di kawasan Pasifik. Meskipun Uni Soviet tidak mendapat tempat di kalangan negara-negara Pasifik Selatan (antara lain tidak terdapat perwakilannya di Pasifik Selatan), kehadirannya cukup riil di kawasan Pasifik. Philip Bowring dalam *Financial Times* melaporkan bahwa kapal-kapal ikan dan kapal-kapal penjelajah Uni Soviet sering muncul di Suva dan kawasan Pasifik lainnya.⁴ Kehadiran kapal-kapal ini tidak lepas tentunya dari strategi global Uni Soviet untuk menguasai perairan di dunia. Kapal-kapal penjelajah Uni Soviet telah mengarungi ke-tujuh lautan selama bertahun-tahun. Kepentingan Uni Soviet di perairan dunia bukan hal yang baru. Di kawasan Pasifik, kepentingan ini mengingatkan kita akan kedatangan Cossack pertama di pesisir Laut Okhotsk pada tahun 1639.⁵

¹Lihat Wolfgang Ramonat, *loc. cit.*, hal. 289.

²Lihat Bhagwan Singh, *loc. cit.*, hal. 369.

³Lihat Wolfgang Ramonat, *loc. cit.*, hal. 288.

⁴Lihat *Financial Times*, 20 Mei 1980.

⁵Lihat Ulrich Schweinfurth, "New Pacific and the Super Power," *Aussen Politik*, Vol. 28, No. 2, 1977, hal. 214.

Kehadiran kedua kekuatan dunia di kawasan Pasifik Selatan itu akhir-akhir ini mendorong musuh utama Uni Soviet, yakni Cina, untuk berperan aktif di kawasan ini. Cina pernah melakukan percobaan peluru kendali antar benua (ICBM) di Pasifik Selatan.¹ Kedudukan Cina lebih beruntung daripada Uni Soviet karena negara ini memiliki perwakilan antara lain di Fiji, Samoa Barat, dan Papua Niugini. Cina malahan berusaha berbaik hati dengan negara-negara Pasifik Selatan, misalnya, dengan menjanjikan akan melindungi Samoa Barat apabila diserang Uni Soviet. Kehadiran negara-negara besar ini menimbulkan kekuatiran negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, karena dengan demikian kawasan ini bisa menjadi arena perlombaan kekuatan.

IV. PERANAN REGIONAL AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU

Dibandingkan dengan negara-negara besar itu, Australia dan Selandia Baru mempunyai lebih banyak peluang untuk memainkan peranan regional di Pasifik Selatan. Negara-negara Pasifik Selatan menganggap kedua negara ini sebagai sahabat utama yang terpercaya, antara lain karena mereka dalam banyak hal mendukung usaha-usaha ataupun aspirasi perjuangan bangsa Pasifik Selatan, misalnya dalam masalah dekolonisasi dan regionalisme. Mereka malahan menentang tindakan negara-negara yang bersifat mengancam keamanan wilayah seperti percobaan-percobaan nuklir.

Selain itu Australia dan Selandia Baru mengutamakan negara-negara Pasifik Selatan dalam hubungan internasional mereka. Perhatian mereka ini disebabkan sebagian oleh faktor ekonomi, misalnya potensi negara-negara Pasifik Selatan untuk menjadi pasaran ekspor; dan sebagian oleh rasa dan tanggung jawab regional. Mereka merasa sebagai bagian Pasifik Selatan, karena secara geografis terletak di kawasan ini; dan secara etnis penduduk asli Selandia Baru, yakni bangsa Maori, merupakan bagian bangsa Polinesia.² Australia juga tidak bisa melepaskan kebanggaannya sebagai negara besar yang berpengaruh di Pasifik Selatan, Hedley Bull mengatakan: "Australia adalah negara besar, dan kadang-kadang mempunyai impian - beberapa mengatakan khayalan - akan kebesaran di masa mendatang."³

Oleh sebab itu tidak mengherankan bahwa kedua negara ini membantu negara-negara Pasifik Selatan memperjuangkan hak dan aspirasi mereka. Per-

¹Lihat *Financial Times*, 20 Mei 1980.

²Lihat Hedley Bull, "Australia-New Zealand Defence Corporation," yang diterbitkan Keir Keith, *Defence Perspectives* (Wellington: Price Milburn and Company Limited, 1972), hal. 104.

³*Ibid.*

tama, setelah melepaskan daerah-daerah jajahan (antara lain Papua Niugini oleh Australia, dan Samoa Barat oleh Selandia Baru), mereka mendukung dekolonisasi Pasifik Selatan. Kedua, mereka mendukung usaha-usaha negara Pasifik Selatan ini menentang percobaan-percobaan nuklir (oleh Perancis) dan percobaan rudal (oleh Cina). Australia jelas melarang percobaan, penempatan, dan pemindahan senjata-senjata nuklir,¹ karena merasa bahwa semuanya itu membahayakan dan mengotori wilayahnya juga. Selandia Baru amat menentang percobaan rudal Cina yang dianggap sama saja dengan percobaan nuklir Perancis. Ketiga, mereka malahan sejak semula mengusahakan terciptanya regionalisme Pasifik Selatan, seperti terlihat dalam inisiatif mereka untuk mendirikan organisasi-organisasi regional seperti Komisi Pasifik Selatan (South Pacific Commission) dan Forum Pasifik Selatan (South Pacific Forum). Dan kemudian, mereka menunjang usaha-usaha pembangunan negara-negara Pasifik Selatan, antara lain dengan memberi bantuan ekonomi/keuangan dan jasa kepada mereka dan mengajak negara-negara Barat untuk meningkatkan perhatian mereka di kawasan ini.

Namun negara-negara Pasifik Selatan tampaknya membedakan kedua negara ini. Negara-negara ini, terutama yang berpenduduk Polinesia, lebih menyenangi Selandia Baru daripada Australia, meskipun Australia merupakan pemberi bantuan keuangan terbesar dalam Komisi Pasifik Selatan. Mereka menganggap Selandia Baru sebagai pelopor yang paling ramah dan mudah dihubungi meskipun jauh dari pulau-pulau Pasifik. S.M. Koya mengatakan: "... saya kira saya tidak keliru untuk menyatakan bahwa sejalan dengan peranan dan kewajibannya dalam organisasi-organisasi regional dan internasional, Selandia Baru secara kokoh berusaha bagi kebaikan umat manusia secara menyeluruh ..."² Bagi mereka, Selandia Baru adalah kekuatan utama yang sanggup memberi bantuan secara praktis.³ Hubungan Australia dan negara-negara Pasifik Selatan tampaknya tidak begitu akrab. Mereka melihat Australia sebagai suatu dunia besar yang sering kasar dan menakutkan.⁴ Malahan Papua Niugini, tetangga yang terdekat dan mempunyai ikatan yang kuat dengan Australia, menganggap bantuan-bantuan dari Australia sebagai bentuk neo-kolonialisme, sementara beberapa negara menyadari bahwa mereka tidak memperoleh banyak bantuan keuangan tetapi terlalu banyak nasihat dari Australia.⁵

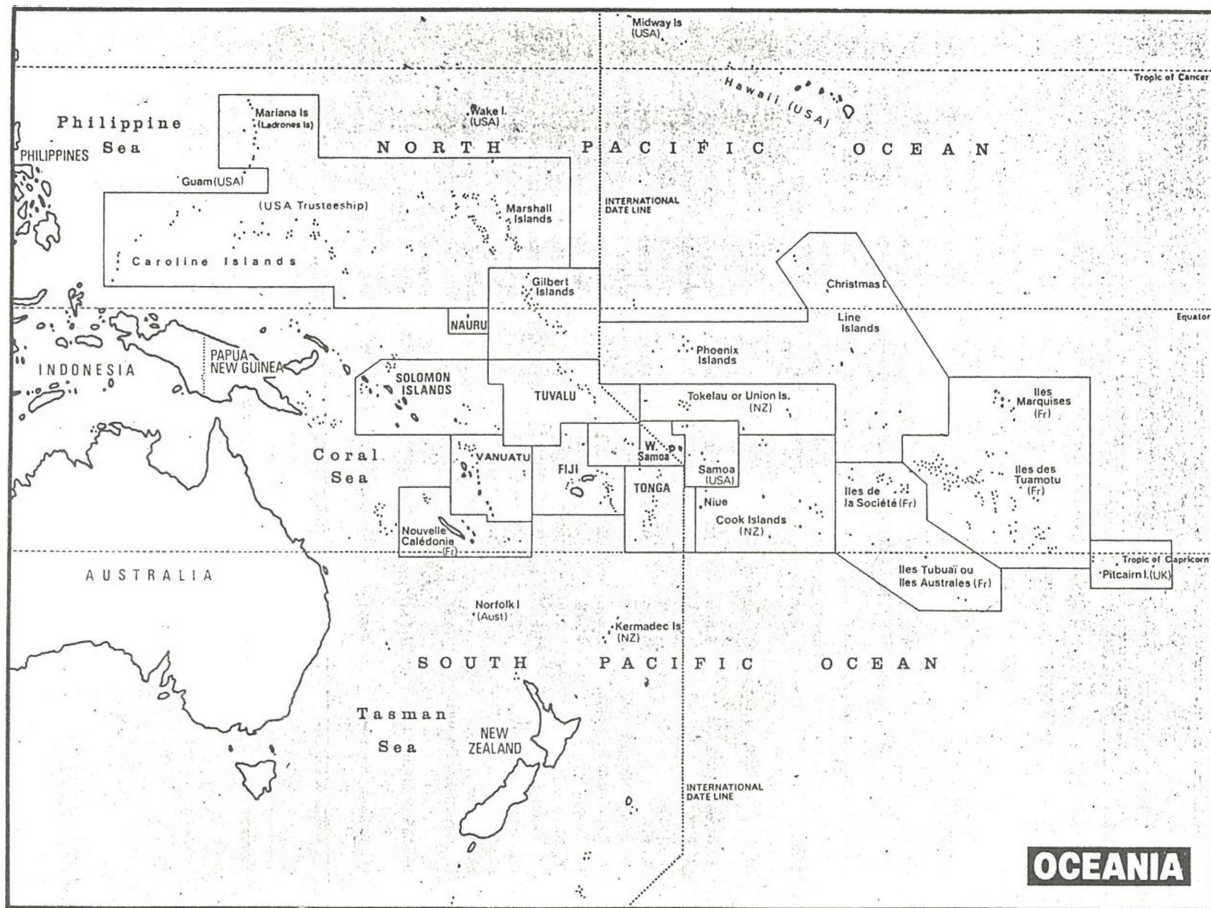
¹Lihat Keith D. Suter, *loc. cit.*, hal. 59.

²Lihat S.M. Koya, *loc. cit.*, hal. 33.

³Lihat Ulrich Schweinfurth, "New Zealand in the Pacific and Antarctic Area," *Aussen Politik*, Vol. 31, No. 4, 1980, hal. 424.

⁴Lihat RQ. Quentin-Baxter, "A New Zealand View," diterbitkan Mary Boyd, *Pacific Horizons*, *loc. cit.*, hal. 23.

⁵Lihat Juerg Meister, "The Southern Hemisphere as a Defence Community," *Pacific Defence Reporter*, Maret 1982, hal. 55.



Tetapi negara-negara Pasifik Selatan tidak bisa mengabaikan peranan regional Australia, karena dari segi kemampuan (capability), Australia berada jauh di atas mereka. Misalnya, dalam bidang militer negara-negara kecil ini, baik pada saat ini maupun di masa mendatang, tidak mempunyai kemampuan. Dengan industri pertahanannya, Australia menjadi kekuatan militer satu-satunya di Pasifik Selatan.

Tabel

LUAS WILAYAH, PENDUDUK, GNP PER KAPITA DAN
STATUS NEGARA-NEGARA PULAU PASIFIK SELATAN

Negara	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk (Tahun Perkira- an)	GNP Per Kapita (US\$)	Status
1. Samoa Barat	2.840	155.500 (1980)	450 (1978)	Merdeka, 1 Januari 1962
2. Nauru	22	7.700 (1979)	...	Merdeka, 30 Januari 1968
3. Tonga	700	95.000 (1980)	...	Merdeka, 4 Juni 1970
4. Fiji	18.274	625.000 (1980)	1.160 (1978)	Merdeka, 10 Oktober 1970
5. Papua Niugini	461.691	3.000.000 (1980)	600 (1979)	Merdeka, 16 September 1975
6. Kepulauan Solomon	28.446	221.500 (1980)	430 (1978)	Merdeka, 7 Juli 1978
7. Tuvalu	26	7.300 (1979)	...	Merdeka, 1 Oktober 1978
8. Kiribati	719	57.300 (1978)	...	Merdeka, 12 Juli 1979
9. Vanuatu	11.800	112.600 (1979)	540 (1978)	Merdeka, 30 Juli 1980
10. Kepulauan Cook	234	19.250 (1979)	...	Asosiasi dengan Selandia Baru
11. Niue	258	3.575 (1979)	...	Asosiasi dengan Selandia Baru
12. Tokelau	...	1.565 (1978)	...	Asosiasi dengan Selandia Baru
13. Kepulauan Pitcairn	450	64 (1979)	...	Wilayah Inggris (British Dependency)
14. Kaledonia Baru	22.125	137.000 (1979)	4.650 (1978)	Wilayah Perancis (Overseas Ter- ritory of France)
15. Polinesia Perancis	4.000	137.000 (1977)	5.270 (1978)	Wilayah Perancis (Overseas Ter- ritory of France)
16. Wallis & Futuna	274	10.000 (1979)	...	Wilayah Perancis (Overseas Ter- ritory of France)

Sumber: Diolah dari *Asia & Pacific 1982*, (Essex: World of Information).

V. PENUTUP

Kawasan Pasifik Selatan dewasa ini cukup menarik, karena paling tidak proses dekolonisasi yang berlangsung di sana mengakibatkan beberapa perubahan status. Sampai batas-batas tertentu, proses dekolonisasi itu berlangsung dengan baik, karena sebagian besar wilayah telah memperoleh kemerdekaan dan menjadi anggota PBB. Tetapi beberapa wilayah, khususnya

Kaledonia Baru dan Polinesia Perancis, belum merdeka, karena Perancis tidak bersedia melepaskannya. Apalagi sebagian besar penduduk non Melanesia tidak menginginkan Kaledonia merdeka.

Bersamaan dengan proses ini, negara-negara yang baru itu mengusahakan *regionalisme* sebagai salah satu aspirasi mereka untuk membentuk suatu masyarakat Pasifik Selatan di kawasan tersebut. Hambatan utama mereka kiranya berkaitan dengan ketergantungan yang begitu besar pada negara-negara besar akibat terbatasnya kemampuan (*capability*) mereka. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat berbuat sesuatu untuk mencegah kekuatan-kekuatan asing melakukan percobaan-percobaan nuklir dan penangkapan-penangkapan ikan, selain menggunakan hak suara di forum-forum internasional.

Dalam melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan internasional, negara-negara Pasifik Selatan yang masih berusia muda ini perlu menyesuaikan diri dengan dunia luar termasuk negara-negara Dunia Ketiga. Bahwa mereka tidak mau dikatakan sebagai bagian Dunia Ketiga bisa menjauhkan mereka dari negara-negara Dunia Ketiga, sehingga akan terpercil dari perhatian dunia. Sikap mereka ini juga berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan mereka mengenai Dunia Ketiga akibat kurangnya arus informasi dan komunikasi antara mereka.